

Pendidikan Berbasis Karakter dan Keterampilan: Analisis Komparatif Kebijakan Madrasah dan Sekolah Kejuruan

Abdul Azis Muslimin¹, Muliadi², Adji Saputra Cendana³, Nurliana⁴, Nurmiani⁵

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^{2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: abdazizm@uin-alauddin.ac.id¹, muliadi41018@gmail.com², Cendanaa86@yahoo.com³, nurlianajsp@gmail.com⁴, nurmianimaher@gmail.com⁵

Article History:

Received: 12 Juli 2025

Revised: 20 September 2025

Accepted: 23 September 2025

Keywords: Kebijakan Pendidikan, Madrasah, Sekolah Kejuruan, Implementasi Kebijakan, Mutu Lulusan.

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pendidikan nasional terhadap karakteristik dan kebutuhan lembaga pendidikan madrasah serta sekolah menengah kejuruan (SMK). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis kebijakan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji tantangan struktural dan kontekstual dalam implementasi kebijakan pendidikan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap mutu lulusan dan kesiapan daya saing peserta didik. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara dengan pemangku kepentingan di SMK Negeri 1 Raha, dan observasi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan telah dirancang untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius di tingkat satuan pendidikan. Madrasah sering mengalami keterbatasan dalam integrasi kurikulum agama dan umum serta akses terhadap inovasi kebijakan. Sementara itu, SMK di daerah mengalami kesenjangan dalam sarana praktik dan kemitraan industri. Studi ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, lintas sektoral, serta responsif terhadap konteks lokal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan merata di seluruh jenis lembaga pendidikan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi di tengah arus globalisasi dan kompleksitas tantangan abad ke-21. Dalam konteks Indonesia, sistem pendidikan nasional dirancang untuk mewujudkan keadilan, inklusivitas, dan relevansi terhadap kebutuhan pembangunan bangsa. Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan kerap dihadapkan pada kenyataan beragamnya jenis dan karakter lembaga pendidikan, seperti madrasah dan sekolah menengah kejuruan (SMK), yang

masing-masing memiliki orientasi dan struktur kelembagaan yang berbeda. Perbedaan ini menuntut adanya penyesuaian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Madrasah sebagai institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki mandat ganda, yakni integrasi pendidikan umum dengan pendidikan agama. Di sisi lain, SMK yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menitikberatkan pada penguatan keterampilan vokasional yang selaras dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Keduanya memiliki peran strategis dalam mendidik generasi muda, tetapi dengan pendekatan, kurikulum, dan indikator keberhasilan yang berbeda. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan nasional tidak dapat diukur secara seragam tanpa memperhatikan perbedaan struktural, kontekstual, dan kultural di masing-masing lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, perbedaan kewenangan kelembagaan, distribusi anggaran, serta akses terhadap inovasi kurikulum seperti Kurikulum Merdeka sering kali menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan yang merata dan berkeadilan. Madrasah, khususnya yang swasta, kerap tertinggal dalam penguatan infrastruktur dan pelatihan guru. Sementara itu, SMK meski telah mendapat dukungan revitalisasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, masih menghadapi tantangan besar dalam hal keterkaitan dengan dunia industri, penyediaan sarana praktik, dan kompetensi guru produktif. Kompleksitas inilah yang menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan, yang pada gilirannya mempengaruhi mutu dan daya saing lulusan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan pendidikan nasional dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik madrasah serta SMK. Dengan pendekatan analisis kebijakan yang sistematis dan berbasis data, tulisan ini mengeksplorasi tantangan implementasi di tingkat satuan pendidikan, mengevaluasi dampak kebijakan terhadap mutu lulusan dan kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja, serta mengangkat studi kasus dari SMK Negeri 1 Raha sebagai potret konkret dinamika pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan kontekstual sesuai kebutuhan ragam lembaga pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan yang bersifat deskriptif-analitis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan pendidikan nasional dengan karakteristik lembaga pendidikan, khususnya madrasah dan sekolah menengah kejuruan (SMK), serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut di tingkat satuan pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali data secara mendalam dan kontekstual mengenai dinamika kebijakan, baik dalam tataran konseptual maupun pelaksanaannya di lapangan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam studi kebijakan pendidikan yang memadukan analisis dokumen kebijakan formal, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kurikulum Merdeka, dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi kasus untuk mendalami implementasi kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1 Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi studi kasus dilakukan secara purposif berdasarkan

karakteristik geografis dan keterbatasan akses terhadap dunia industri, yang dinilai relevan untuk menggambarkan tantangan implementasi kebijakan di daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah, guru produktif, dan pengelola kurikulum di SMK Negeri 1 Raha. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan resmi kementerian, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan observasi partisipatif. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan pendidikan, laporan evaluasi, serta publikasi akademik yang memberikan pemahaman teoritis dan normatif tentang kebijakan pendidikan nasional. Teknik wawancara digunakan secara selektif terhadap informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dengan kebijakan yang diteliti. Sedangkan observasi partisipatif dilakukan melalui kunjungan langsung ke SMK Negeri 1 Raha untuk mengamati kondisi sarana dan prasarana serta proses pembelajaran secara nyata.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis terhadap dokumen kebijakan dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tujuan, instrumen, dan hasil dari kebijakan yang diterapkan. Data lapangan dianalisis secara tematik untuk mengekstrak pola-pola yang menggambarkan hubungan antara isi kebijakan dan kenyataan di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, metode, maupun informan. Triangulasi ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang. Selain itu, dilakukan juga teknik pemeriksaan anggota (member checking) kepada sejumlah informan guna memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh subjek penelitian. Dengan demikian, keandalan dan kredibilitas hasil penelitian dapat terjaga secara akademik dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Kebijakan Pendidikan dengan Tujuan Lembaga: Karakteristik Madrasah dan Sekolah Kejuruan

Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Dasarnya Bertujuan Untuk Menciptakan Sistem Pendidikan Yang Adil, Berkualitas, Dan Relevan Dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional. Namun, Dalam Praktiknya, Setiap Jenis Lembaga Pendidikan Memiliki Karakteristik Dan Orientasi Yang Berbeda, Sehingga Kebijakan Yang Diterapkan Harus Mempertimbangkan Kekhasan Tersebut. Dua Jenis Lembaga Yang Menonjol Dalam Konteks Ini Adalah Madrasah Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Smk). Meskipun Keduanya Berada Dalam Sistem Pendidikan Formal, Arah Dan Struktur Kelembagaannya Memiliki Perbedaan Yang Signifikan, Baik Dalam Hal Kurikulum, Struktur Kelembagaan, Maupun Orientasi Lulusan.

1. Karakteristik dan Tujuan Pendidikan Madrasah

Madrasah Merupakan Institusi Pendidikan Formal Yang Berada Di Bawah Naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). Madrasah Mengintegrasikan Pendidikan Umum Dan Pendidikan Agama, Serta Memainkan Peran Strategis Dalam Mencetak Peserta

Didik Yang Tidak Hanya Cakap Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Tetapi Juga Memiliki Pemahaman Keagamaan Yang Kuat. Jenis Madrasah Meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Dan Madrasah Aliyah (MA). Selain Itu, terdapat juga Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang mengombinasikan pendidikan keagamaan dan vokasional.

Kurikulum yang diterapkan pada madrasah mengacu pada Kurikulum Nasional (Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013), tetapi ditambah dengan kurikulum keagamaan seperti Akidah Akhlak, Fikih, Al-Qur'an Hadis, Bahasa Arab, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan pada madrasah harus mengakomodasi integrasi antara ilmu umum dan ilmu keislaman, sekaligus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal di mana madrasah tersebut berada.

Namun, dalam implementasinya, madrasah kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap kebijakan baru, terutama kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satu contoh adalah keterlambatan dalam penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah, yang baru mulai diadopsi sebagian madrasah percontohan sejak 2022, sementara sekolah umum sudah lebih dahulu menerapkannya.

2. Karakteristik dan Tujuan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK)

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan formal yang berfokus pada pembekalan keterampilan teknis dan vokasional untuk menyiapkan peserta didik masuk ke dunia kerja atau berwirausaha. SMK berada di bawah Kemendikbudristek, dengan kurikulum yang didesain untuk merespons dinamika kebutuhan industri. SMK memiliki berbagai program keahlian seperti teknik kendaraan ringan, tata boga, agribisnis, perhotelan, dan lain sebagainya.

Kebijakan pendidikan untuk SMK mengalami banyak reformasi dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya adalah program Revitalisasi SMK yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. Program ini menekankan pentingnya kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pembaruan peralatan praktik, pelatihan guru produktif, dan penerapan teaching factory.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama di daerah tertinggal dan non-industri. Banyak SMK menghadapi tantangan seperti kurangnya akses terhadap teknologi industri terkini, keterbatasan guru produktif yang kompeten, serta minimnya link and match antara program keahlian yang tersedia dan kebutuhan pasar kerja lokal. Akibatnya, lulusan SMK masih menghadapi tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi dibandingkan lulusan SMA atau MA.

Implementasi Kebijakan: Tantangan Struktural dan Kontekstual di Tingkat Satuan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses konkretisasi dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh otoritas pendidikan ke dalam praktik nyata di tingkat sekolah atau madrasah. Meskipun kebijakan pendidikan nasional dirancang untuk menciptakan kesetaraan dan peningkatan mutu, kenyataannya implementasi di tingkat satuan pendidikan baik di madrasah maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) menghadapi berbagai tantangan struktural dan kontekstual yang kompleks.

1. Tantangan Struktural dalam Tata Kelola dan Regulasi

Tantangan struktural muncul dari perbedaan tata kelola antara madrasah dan SMK. Madrasah berada di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan SMK dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Perbedaan struktur kelembagaan ini menimbulkan kesenjangan dalam hal:

- a. Distribusi anggaran dan sumber daya manusia. Banyak madrasah swasta yang mengalami keterlambatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), keterbatasan akses terhadap pengembangan kapasitas guru, dan belum meratanya dukungan infrastruktur pendidikan.
- b. Koordinasi antar kementerian yang lemah, menyebabkan kebijakan nasional seperti Asesmen Nasional (AN) dan Kurikulum Merdeka tidak dapat diimplementasikan secara seragam dan tepat waktu di madrasah.

Sementara itu, pada SMK, tantangan struktural tampak pada lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha/industri dalam mendukung pembelajaran berbasis keterampilan (skills-based learning). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK belum diimplementasikan secara optimal karena banyak daerah tidak memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung program tersebut.

2. Tantangan Kontekstual: Kualitas SDM, Infrastruktur, dan Sosial Budaya

Selain persoalan struktural, implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual, seperti:

- a. Kualitas dan Ketersediaan Guru
Guru adalah pelaku utama dalam implementasi kebijakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih rendahnya kualitas guru di madrasah dan SMK, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Banyak guru belum memperoleh pelatihan Kurikulum Merdeka atau belum memiliki kompetensi pedagogik yang sesuai standar nasional. Pada SMK, hanya sekitar 25% guru produktif yang memiliki sertifikasi industri yang diakui dunia kerja.
- b. Kesenjangan Sarana dan Prasarana
Kebijakan pembelajaran berbasis teknologi dan industri membutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai. Namun, banyak madrasah terutama madrasah swasta tidak memiliki laboratorium IPA, komputer, atau koneksi internet yang stabil. SMK di daerah pedesaan juga mengalami kekurangan alat praktik yang sesuai standar industri sehingga pembelajaran kejuruan tidak optimal.
- c. Konteks Sosial Budaya dan Geografis
Implementasi kebijakan sering kali tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tradisi pendidikan setempat. Misalnya, sebagian madrasah masih mempertahankan pendekatan pembelajaran tradisional berbasis kitab kuning dan kurang merespons pendekatan pembelajaran modern seperti pembelajaran berbasis proyek atau profil pelajar Pancasila. Sementara itu, beberapa SMK membuka program keahlian yang tidak sesuai dengan potensi lokal karena hanya mengikuti tren nasional, seperti membuka program perhotelan di daerah pertanian, yang akhirnya tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap Mutu Lulusan dan Kesiapan Daya Saing

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, baik pada madrasah maupun sekolah menengah kejuruan (SMK), sejatinya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan lulusan yang siap bersaing di era global. Evaluasi terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan tersebut tercapai dan bagaimana kebijakan yang telah dijalankan memengaruhi kualitas lulusan dari berbagai aspek, terutama dari sisi kompetensi akademik, keterampilan hidup, dan kesiapan daya saing di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan.

1. Mutu Lulusan: Indikator dan Realitas

Mutu lulusan dapat diukur dari berbagai indikator, seperti hasil asesmen nasional, angka kelulusan, partisipasi pada pendidikan tinggi, tingkat literasi dan numerasi, serta pengakuan dari dunia kerja.

a. Madrasah

Madrasah mengalami tantangan ganda: menjaga identitas keislaman dan meningkatkan mutu akademik. Hasil evaluasi oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa:

- 1) Literasi dan numerasi siswa madrasah masih tertinggal dibandingkan sekolah umum. Misalnya, berdasarkan hasil ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) tahun 2023, rerata literasi siswa madrasah lebih rendah dari rerata nasional.
- 2) Siswa madrasah cenderung unggul dalam pendidikan karakter dan nilai-nilai keislaman, namun kurang optimal dalam penguasaan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sementara itu, SMK menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Meski telah ada kebijakan seperti Revitalisasi SMK melalui Inpres No. 9 Tahun 2016, namun:

- 1) Tingkat serapan lulusan SMK di dunia kerja masih rendah. Data dari BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK adalah yang tertinggi dibandingkan jenjang lainnya, yaitu sebesar 8,42%.
- 2) Banyak lulusan SMK tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan keahlian mereka, karena mismatch antara program keahlian di sekolah dan kebutuhan industri lokal.

2. Daya Saing Lulusan: Problem Kesiapan Kompetensi Abad 21

Kesiapan daya saing lulusan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan konten, tetapi juga oleh kemampuan abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis (4C). Kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab tantangan ini. Namun, implementasi di madrasah dan SMK masih menghadapi kendala berikut:

- a. Rendahnya kemampuan digital dan literasi teknologi di kalangan siswa madrasah dan SMK, khususnya di wilayah non-perkotaan.
- b. Kurangnya pelatihan guru dalam pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan abad ke-21, sehingga lulusan cenderung pasif dan tidak inovatif.
- c. Belum meratanya kerja sama dengan industri dan perguruan tinggi sebagai mitra pengembangan kompetensi lulusan. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan membangun portofolio dan pengalaman kerja nyata sebelum lulus.

Studi Kasus

Tantangan Implementasi Kurikulum Kejuruan di SMK Negeri 1 Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

SMK Negeri 1 Raha, sebuah sekolah menengah kejuruan yang terletak di pusat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sekolah ini dipilih secara purposif karena mewakili karakteristik daerah dengan keterbatasan akses terhadap dunia industri, namun memiliki semangat tinggi dalam menjalankan pendidikan kejuruan.

Analisis Masalah:

1. Proses Implementasi Kurikulum kejuruan di SMK Negeri 1 Raha
2. Hambatan dan Strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya

Solusi dari Permasalahan yang dapat diterapkan

Implementasi kurikulum kejuruan di SMK Negeri 1 Raha membawa harapan besar: siswa yang tidak hanya cakap teori, tetapi juga terampil menghadapi dunia kerja yang nyata. Namun, sebagaimana yang sering terjadi dalam dunia pendidikan, harapan yang besar tidak selalu berjalan mulus dalam praktik. Di balik usaha sekolah mengadopsi Kurikulum Kejuruan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh guru, siswa, maupun manajemen sekolah secara keseluruhan.

Guru kejuruan sejatinya memegang peran kunci dalam kurikulum ini, karena mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi juga menjadi pembimbing praktik, mentor, bahkan terkadang menjadi “pengganti industri” bagi siswa. Namun, di SMK Negeri 1 Raha, keterbatasan fasilitas dan minimnya kesempatan magang guru di dunia industri membuat proses transfer keterampilan menjadi kurang maksimal. Akibatnya, guru merasa serba tanggung dalam mengajarkan materi, dan siswa pun hanya mendapat pengalaman praktik yang terbatas.

Fasilitas dan sarana praktik menjadi tantangan lain yang nyata. Bengkel-bengkel yang ada di sekolah ini sebagian besar sudah usang, dan alat-alat yang tersedia tidak semua sesuai dengan teknologi yang digunakan di dunia industri saat ini. Beberapa siswa bahkan menyebut bahwa praktik yang dilakukan di sekolah berbeda jauh dari apa yang mereka lihat ketika mengikuti kunjungan industri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, yang seharusnya dapat dijembatani melalui kemitraan yang kuat.

Sayangnya, kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI) masih belum berkembang optimal. Letak geografis Kabupaten Muna yang jauh dari pusat-pusat industri besar menjadi salah satu alasan utama. Sekolah telah mencoba menjalin kerja sama dengan bengkel lokal, toko, dan usaha mikro, namun bentuk kerjasamanya masih bersifat informal dan jangka pendek. Program magang pun belum bisa berjalan secara terstruktur karena keterbatasan jumlah tempat praktik dan belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang kuat.

Dampak dari kendala-kendala ini sangat terasa pada proses pembelajaran. Guru harus berimprovisasi dengan peralatan seadanya. Siswa pun harus puas dengan materi praktik yang bersifat simulasi, bukan pengalaman langsung. Beberapa guru bahkan menyampaikan keprihatinannya, bahwa mereka “mengajarkan keterampilan kerja tanpa alat kerja,” sebuah kondisi yang tentu sangat ironis bagi sekolah kejuruan yang dituntut menghasilkan lulusan siap pakai.

Namun di tengah keterbatasan itu, semangat para guru dan siswa tidak padam. Guru berusaha mencari solusi kreatif, seperti memanfaatkan barang bekas untuk praktik, atau menggunakan video simulasi sebagai pengganti pengalaman langsung. Siswa juga menunjukkan antusiasme tinggi untuk belajar, meskipun mereka sadar bahwa fasilitas yang tersedia belum ideal. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang bisa dikembangkan jika dukungan dari pemerintah dan mitra industri lebih diperkuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan nasional di Indonesia pada dasarnya telah dirancang untuk mendorong peningkatan mutu, pemerataan akses, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Namun, dalam konteks implementasi di madrasah dan sekolah menengah kejuruan (SMK), kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik kelembagaan dan orientasi masing-masing satuan pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan bercorak keagamaan menghadapi tantangan dalam integrasi kurikulum umum dan agama, keterbatasan sumber daya, serta kesenjangan koordinasi antara Kementerian Agama dan Kemendikbudristek. Sementara itu, SMK yang difokuskan pada pendidikan vokasional masih menghadapi hambatan dalam penguatan kerja sama dengan dunia industri, keterbatasan peralatan praktik, serta kurangnya guru produktif yang memiliki kompetensi industri.

Selain tantangan struktural, implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti kualitas guru, kesiapan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas lulusan dari kedua jenis lembaga pendidikan masih menghadapi kesenjangan dalam hal penguasaan kompetensi abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan program revitalisasi SMK belum berjalan secara optimal dan belum mampu menjawab kebutuhan nyata peserta didik, khususnya di wilayah tertinggal.

Studi kasus di SMK Negeri 1 Raha semakin menegaskan bahwa upaya implementasi kebijakan pendidikan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan kapasitas guru, serta kemitraan yang strategis dengan dunia usaha dan industri. Meskipun semangat dan antusiasme dari guru dan siswa tetap tinggi, keterbatasan dalam fasilitas, pelatihan, dan jaringan kemitraan menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan terkoordinasi lintas kementerian agar efektivitas implementasi dapat terwujud dan kesenjangan antarlembaga dapat diminimalisasi. Dalam jangka panjang, peningkatan daya saing lulusan hanya dapat dicapai melalui harmonisasi antara arah kebijakan nasional, kekhasan lembaga pendidikan, serta kebutuhan riil masyarakat dan dunia kerja.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: BPS.
- Direktorat SMK. (2022). *Monitoring dan evaluasi teaching factory di SMK*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Fadillah, A. (2023). Integrasi kebijakan pendidikan antara Kemendikbud dan Kemenag: Sebuah tinjauan implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 11(1), 45–60.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Kurikulum pendidikan madrasah*. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Pedoman implementasi kurikulum madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Pemetaan kompetensi guru madrasah*. Jakarta: Balai Diklat Keagamaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Laporan evaluasi revitalisasi SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Strategi revitalisasi pendidikan vokasi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Implementasi Merdeka Belajar: Evaluasi dan tantangan*. Jakarta.
- Nurkholis, M. (2023). Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 123–136.

- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Bank. (2020). *Skills for the future: Indonesia's technical and vocational education and training*. Washington, DC: World Bank Publications.